



Implementasi Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya (Studi Kasus pada Unit Usaha Pitstop Kelurahan Lidah Kulon)

Lily Aisyah Putri^{1*}, Weni Rosdiana²

¹⁻²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: lily.042@mhs.unesa.ac.id¹, wenirosdiana@unesa.ac.id²

*Penulis Korespondensi: lily.042@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract. *The Labor-Intensive Housing Program is one of the Surabaya City Government's policies aimed at reducing poverty and unemployment through labor-intensive community empowerment. This study aims to describe and analyze the implementation of the Labor-Intensive Housing Program (RPK) at the Pitstop business unit in Lidah Kulon Village, Lakarsantri Subdistrict, Surabaya City. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing Van Meter and Van's policy implementation theory. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were derived from official documents and relevant publications. The results showed that the implementation of the Pitstop Labor Intensive Housing Program has not yet been optimal. In terms of policy standards and objectives, the program's goals have been clearly defined but have not yet been fully achieved. Regarding resources, the availability of facilities and funding is adequate, but there are still limitations in human resources, particularly skilled technicians in the automotive repair field. Inter organizational communication has taken place but has not been intensive enough to support business sustainability. Characteristics of the implementing agents indicate that the structure of the Labor-Intensive Housing team has been clearly defined; however, implementation in the field has not been optimal due to weak coordination and communication. Economic, social, and political conditions—such as a less-than-strategic business location and high competition from similar businesses—have also contributed to the low number of customers. Meanwhile, the disposition of the implementers demonstrates a positive attitude in supporting the Labor-Intensive Housing program. The Labor-Intensive Housing Program must be supported by professional mechanics through education, certification, and collaboration with the private sector and training institutions to ensure the quality of services. In addition, building public trust, coordination among stakeholders, and intensive support through monitoring and evaluation are key to the success and sustainability of the Labor-Intensive Housing Program.*

Keywords: *Government; Implementation; Labor-Intensive Housing; Police; Surabaya.*

Abstrak. Program Rumah Padat Karya merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat berbasis padat karya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Rumah Padat Karya (RPK) unit usaha Pitstop di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rumah Padat Karya Pitstop belum berjalan optimal. Standar dan sasaran program telah dirumuskan dengan jelas, namun pelaksanaannya belum maksimal. Sumber daya fasilitas dan dana cukup memadai, tetapi masih terdapat keterbatasan tenaga ahli di bidang bengkel. Komunikasi antar organisasi telah berjalan, meskipun belum intensif dalam mendukung keberlanjutan usaha. Selain itu, kondisi lingkungan ekonomi dan persaingan usaha turut memengaruhi rendahnya jumlah pelanggan. Meskipun demikian, implementor menunjukkan sikap positif dalam mendukung program. Oleh karena itu, diperlukan tenaga mekanik profesional, peningkatan koordinasi antar pihak, serta pendampingan melalui monitoring dan evaluasi untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah; Rumah Padat Karya; Surabaya.

1. LATAR BELAKANG

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang melibatkan pengorganisasian sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Ghafur, 2022) menjelaskan

bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara seperangkat tujuan dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan implementasi kebijakan menjadi salah satu tolak ukur utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas, tersedianya sumber daya yang memadai, komunikasi yang baik antar organisasi, karakteristik pelaksana kebijakan, dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau komitmen dari para pelaksana kebijakan tersebut. Keenam faktor ini saling terkait dan menentukan seberapa efektif kebijakan dapat diterapkan di lapangan.

Bentuk penerapan nyata dari implementasi kebijakan publik, pemerintah merancang program Pembangunan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah program Padat Karya. Program tersebut dirancang sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Program padat karya merupakan bentuk kebijakan yang mengacu pada penggunaan tenaga kerja manusia dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan industri, daripada mengandalkan mesin, sehingga dapat membuka peluang pekerjaan secara masif bagi masyarakat (Annazah et al., 2024). Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat penganggur maupun setengah penganggur melalui kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang memanfaatkan potensi sumber daya, tenaga kerja, serta teknologi lokal (Annazah et al., 2024) Pelaksanaan kegiatan padat karya berada di bawah tanggung jawab pejabat pimpinan tinggi madya pada unit pelaksana teknis di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan.

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya di Kota Surabaya. Program Padat Karya di Surabaya dikenal dengan sebutan Rumah Padat Karya (RPK) berperan sebagai wadah pemberdayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi Program Rumah Padat Karya (RPK) melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap dinamika sosial ekonomi yang terjadi di Kota Surabaya. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Surabaya juga menghadapi tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Izzah & Hertati, 2024). Maka dari itu, angka kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah meskipun telah menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis pemberdayaan. Salah satu bentuk implementasi RPK adalah unit usaha Pitstop di Kelurahan Lidah Kulon yang bergerak di bidang jasa servis dan cuci motor. Namun, dalam pelaksanaannya, usaha ini menghadapi berbagai kendala seperti lokasi yang kurang strategis, minimnya promosi, keterbatasan tenaga ahli, serta pendapatan yang belum mencapai target, sehingga menyebabkan usaha berhenti beroperasi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari dua pelaku usaha pada saat pra observasi yang dilakukan oleh peneliti:

"kan namanya remaja, ini tempat baru secara promosi sangat minim jadi butuh penghasilan yang pasti ada dan ini usaha masih babat alas akhirnya satu per satu keluar. Kurang konsisten juga di jam buka. Di sisi lain, bengkel membutuhkan tenaga ahli, jam terbang tinggi dan punya relasi. Kan kalo baru lulus itu pertemanan nya masih sedikit terus cuci bengkel kan disekitar sini itu banyak dan persaingan usaha." (Hasil wawancara dengan pengelola Rumah Padat Karya pada bulan Agustus 2025).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan oleh penulis untuk mendukung kebenaran uraian diatas yaitu penelitian (Siswanto, et al., 2025) menunjukkan bahwa implementasi Program Rumah Padat Karya di Kelurahan Bringin belum optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah jelas, pencapaiannya masih rendah karena banyak usaha berhenti beroperasi akibat minimnya pengunjung dan sumber daya (manusia, dana, dan fasilitas) tergolong memadai, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, komunikasi antarorganisasi kurang efektif dan respons implementor terhadap kebutuhan pelaku usaha cenderung lambat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, et al., 2025) menunjukkan bahwa Implementasi Program Padat Karya Produksi Paving dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan modal lanjutan, lemahnya pengelolaan usaha oleh penerima manfaat, kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta belum optimalnya strategi pemasaran.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan latar belakang diatas yang terdiri dari fenomena, penelitian terdahulu, kutipan media dan pra observasi, peneliti tertarik melakukan pendalaman melalui penelitian dengan judul "Implementasi Program Rumah Padat Karya Di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Unit Usaha Pitstop Kelurahan Lidah Kulon)"

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi untuk merealisasikan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Menurut Pressman

dan Wildavsky dalam Ghafur (2022), implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2022) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi implementor.

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan program agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Van Meter Van Horn menjelaskan bahwa tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, fasilitas, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu implementor menjalankan kebijakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana berperan penting dalam menciptakan koordinasi yang baik selama proses implementasi kebijakan. Van Meter Van Horn (1975) menekankan bahwa kejelasan informasi, koordinasi antar lembaga, serta dukungan teknis dari pihak terkait diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan program. Komunikasi yang efektif dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun tumpang tindih pelaksanaan kebijakan

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Van Meter Van Horn (1975) menjelaskan bahwa struktur birokrasi, kompetensi pelaksana, pola hubungan kerja, serta tingkat koordinasi dalam organisasi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur jelas dan komunikasi yang baik akan lebih mudah menjalankan program secara optimal.

5) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat dan peluang usaha, sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan nilai, norma, dan partisipasi masyarakat terhadap program. Selain itu, dukungan politik dan stabilitas pemerintahan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan.

6) Disposisi Implementor

Disposisi implementor merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Van Meter Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memiliki sikap yang positif, memahami tujuan kebijakan, dan memiliki komitmen untuk mendukung keberhasilan program. Sikap implementor yang baik akan memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan study kasus (*case study*). Menurut Moleong (2017) dalam (Supriatna, Sunarsi, & Permatasari, 2025) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian Deskriptif berfokus pada variabel tunggal tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain (Abubakar, 2021). Lokasi penelitian terletak di Pitstop kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Situs penelitian bertempat di Pitstop Kelurahan Lidah Kulon. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi implementor. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sehingga data yang dihasilkan dapat diuji validitas dan konsistensinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Padat Karya Pitstop Kelurahan Lidah Kulon diresmikan pada bulan Oktober 2024 secara langsung oleh Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya pada bulan September 2025.

Rumah Padat Karya Pitstop ini menyediakan beberapa jenis layanan usaha, antara lain jasa cuci motor, bengkel motor, serta Sentra Wisata Kuliner (SWK), yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Pemilihan jenis usaha tersebut berdasarkan pada kondisi lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai pangkalan ojek online (ojol), sehingga memiliki potensi pasar yang jelas dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Padat Karya Pitstop Kelurahan Lidah Kulon, dengan melibatkan narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, pengelola Pitstop, serta perwakilan pekerja Pitstop. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti. Hasil pengumpulan data tersebut menghasilkan berbagai temuan penelitian yang kemudian disajikan dan dianalisis. Penyajian data dalam studi ini disesuaikan dengan indikator-indikator pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Indikator pertama dalam teori Van Meter Van Horn adalah standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap perumusan kebijakan yang baik harus memuat unsur implementasi dan tolak ukur keberhasilan, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dan diwujudkan 87 dalam bentuk program dapat diimplementasikan secara efektif (Dewi, 2022). Program Padat Karya di Kota Surabaya memiliki acuan dalam melaksanakannya yaitu, Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2023 tentang Rumah Padat Karya. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang terlibat. Implementasi Program Rumah Padat Karya di Kelurahan Lidah Kulon menunjukkan bahwa pemangku, pelaksana dan pengelola RPK telah memahami dengan baik tujuan dan sasaran dari program Rumah Padat Karya, yang dimana penerima manfaat dari program tersebut diutamakan kelompok Keluarga Miskin. Pelaksanaan program Rumah Padat Karya Pitstop Kelurahan Lidah Kulon terjadi penyesuaian dengan melibatkan pemuda Karang Taruna Lidah Kulon.

Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi kelompok Keluarga Miskin di wilayah setempat yang dipengaruhi oleh sistem bagi hasil serta pendapatan yang bersifat tidak tetap. Pendapatan tidak tetap kurang memberikan kepastian penghasilan bagi calon penerima manfaat. Implementasi Program Rumah Padat Karya di Kelurahan Lidah Kulon menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh penerima manfaat yang masih relatif rendah, dimana rata rata pendapatan sehari Rp. 50.000 per hari (lima puluh ribu rupiah). Jika diakumulasi dalam satu bulan, jumlah tersebut masih jauh dari angka upah minimum kota Surabaya yang mencapai sekitar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah).

Salah satu tujuan dan sasaran yang dijelaskan dalam Perwali No. 83 Tahun 2023 yaitu, mengurangi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan di daerah. Kondisi tersebut bisa dikatakan belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan jika dibandingkan dengan standar upah minimum daerah. Salah satu tujuan program yakni, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

2) Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam teori Van Meter dan Van Horn merujuk pada ketersediaan sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia merupakan aset paling vital dalam suatu organisasi. Kualitas layanan bengkel bergantung pada hasil akhir pelayanan, pengelolaan proses internal dan juga kompetensi sumber daya manusia. Pemenuhan sumber daya manusia dalam Program Rumah Padat Karya diprioritaskan bagi warga Kelurahan Lidah Kulon yang tercatat dalam data keluarga miskin (GAMIS) dan belum memiliki pekerjaan serta pelibatan warga dari kelurahan lain tetap dimungkinkan apabila kebutuhan tenaga kerja di wilayah setempat belum terpenuhi.

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Program Rumah Padat Karya di Kecamatan Lakarsantri telah didukung oleh upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja serta pihak swasta, yaitu MPM Motor. Upaya seperti pelatihan karyawan dan perbaikan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi pelayanan serta meningkatkan daya saing bengkel (Baharuddin, Isa, & Mustafa, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan program selaras dengan konsep bina manusia menurut Totok Mardikanto (2015) dalam perspektif pemberdayaan manusia, yaitu upaya peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan.

Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan teknis guna mendorong produktivitas, memperbaiki kualitas serta memberikan nilai tambah pada produk, serta mengembangkan jaringan kemitraan. Tetapi, ditemui adanya kekurangan tenaga ahli seperti mekanik motor dalam mengoptimalkan operasional usaha. Tenaga ahli tersebut diperlukan untuk meningkatkan jaringan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diani, 2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik kompetensi yang dimiliki mekanik maka akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Keterbatasan tenaga

ahli juga dipengaruhi oleh pendapatan usaha yang belum stabil. Pekerja cenderung beralih ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan secara ekonomi.

b. Sumber Dana

Dari segi sumber daya non-manusia seperti sumber infrastruktur dan dana juga dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi Program Rumah Padat Karya. Sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan publik umumnya berasal dari APBN maupun APBD yang didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat pusat maupun daerah (Kendi, 2023). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumber utama anggaran dana dalam melaksanakan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Surabaya dan bantuan dana swadaya masyarakat. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota No. 83 Tentang Rumah Padat Karya Kota Surabaya.

Pelaksanaan kegiatan Pitstop didukung oleh penyediaan berbagai fasilitas yang bersumber dari pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola Pitstop, Kelurahan Lidah Kulon dan Kecamatan Lakarsantri menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan Pitstop berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana utama seperti bangunan, peralatan bengkel, serta perlengkapan pendukung lainnya yang menunjang operasional layanan Pitstop. Sementara itu, untuk keberlanjutan operasional sehari-hari, biaya yang timbul seperti pembayaran listrik, air, dan wifi dibebankan kepada masyarakat pengelola Pitstop.

Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berperan dalam penyediaan fasilitas awal, sedangkan masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan operasional. Skema ini diharap mampu mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengelola usaha, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah diberikan. Sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Moeljarto (1999) dalam (Suaib, 2023) peningkatan kemampuan masyarakat berfokus pada penguatan kapasitas dalam mengelola sumber daya lokal. Hal ini menekankan bahwa masyarakat perlu didorong untuk mampu mengarahkan serta mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki di lingkungan setempat secara mandiri dan berkelanjutan

c. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor pendukung dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten apabila, para pelaksana kekurangan

sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan cenderung tidak dapat berjalan secara efektif, salah satunya terkait dengan keterbatasan fasilitas pendukung lainnya (Mansur, 2021). Keberadaan sarana yang memadai mendukung kelancaran teknis serta berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kualitas layanan yang dihasilkan oleh pelaksana program.

Program Rumah Padat Karya di Kelurahan Lidah Kulon, fasilitas yang tersedia tergolong cukup memadai. Lahan yang digunakan merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya, sementara pembangunan fisik bangunan difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat. Dukungan sarana operasional juga diberikan, meliputi penyediaan meja dan kursi, bantuan modal usaha, jaringan internet (*WiFi*), listrik, serta akses air bersih melalui PDAM. Sebagian fasilitas tidak sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah, melainkan diperoleh melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak swasta seperti Castrol, Gojek, Grab dan MPM Motor.

Bantuan CSR ini menjadi faktor pendukung penting dalam menunjang operasional Pitstop, khususnya dalam menyediakan sarana yang memadai bagi layanan servis motor dan cuci motor berupa peralatan bengkel, oli mesin, oli gardan, serta perlengkapan cuci motor. Penyediaan fasilitas Pitstop berguna dalam peningkatan produktivitas. Dalam teori pemberdayaan manusia yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto (2015), Bina usaha menekankan pentingnya penyediaan sarana produksi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bina usaha mencakup peningkatan hasil produksi, penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi menjadi sarana koordinasi antar pelaksana, penyampaian tujuan dan arah program serta sebagai mekanisme umpan balik dari masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat mendorong pertukaran informasi yang terbuka dan berbasis fakta, sehingga mengurangi munculnya konflik akibat kesalahpahaman maupun interpretasi yang tidak tepat antar pihak yang terlibat (Evianny, Batubara, Rukamana, & Tefa, 2025). Menurut Van Meter Van Horn (1975) Komunikasi antar pelaksana dalam implementasi kebijakan mencakup pemberian saran dan bantuan teknis dari pejabat kepada pelaksana di lapangan. Dukungan tersebut berperan penting dalam membantu pelaksana memahami regulasi, merespons kebijakan, serta memastikan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, proses sosialisasi dan persuasi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman antar aktor kebijakan sehingga implementasi dapat berjalan secara efektif.

Implementasi Program Rumah Padat Karya Pitstop di Kelurahan Lidah Kulon menunjukkan karakteristik *collaborative governance*, yaitu keterlibatan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, hingga tingkat lokal dalam satu program. Keterlibatan berbagai pihak dimulai dari Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, stakeholder dari pihak perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang terlibat yakni, PT. GoTo Gojek Tokopedia, PT. Grab Indonesia, Castrol. MPM Motor. Perspektif implementasi kebijakan, keterlibatan banyak stakeholder dapat dipandang sebagai kekuatan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan program. Kolaborasi antar organisasi merupakan salah satu strategi penting yang dapat diterapkan di berbagai sektor dengan tujuan mendorong inovasi, efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi, memperkuat kemitraan, serta menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks (Sabaruddin, Elwan, Maulid, & Mardiana, 2024)

Di sisi lain, keterlibatan banyak stakeholder dalam implementasi program juga berimplikasi pada meningkatnya kompleksitas koordinasi dan komunikasi antar pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edwards III menyatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka semakin besar potensi terjadinya hambatan komunikasi dan koordinasi. Hasil temuan di lapangan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada pejabat setempat seperti pihak kelurahan maupun kecamatan melalui koordinasi terkait perencanaan dan pengelolaan Pitstop, baik melalui rapat koordinasi maupun grup *WhatsApp*. Akan tetapi, komunikasi terkait monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya tersampaikan secara menyeluruh kepada pihak kelurahan sehingga informasi mengenai pelaksanaan dan perkembangan program lebih banyak diketahui oleh kecamatan dan masyarakat pelaksana.

Dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan menyatakan bahwasanya setelah tahapan perencanaan program Rumah Padat Karya, tidak terdapat pelibatan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi kegiatan selama usaha tersebut berjalan. Sementara itu, komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan jajaran internal pemerintah daerah dan pihak swasta, seperti sekretariat daerah, PT GoTo Gojek Tokopedia maupun yang lainnya, dilaksanakan melalui pertemuan formal yang membahas perencanaan program. Pertemuan tersebut menjadi sarana koordinasi antar pelaksana kebijakan dalam menyamakan persepsi, merumuskan langkah-langkah strategis, serta membahas aspek teknis pelaksanaan program.

Hal tersebut tertuang dalam dokumen surat undangan yang dikeluarkan oleh BAPEDALITBAG Kota Surabaya pada tanggal 9 Juli 2024 mengenai Rapat Koordinasi

Rencana Pembuatan Bengkel. Adapun komunikasi antara pengelola Pitstop dengan pihak kecamatan berlangsung melalui grup *WhatsApp* yang digunakan sebagai media pelaporan serta penyampaian perkembangan usaha secara berkala. Kemudian antara pengelola dan pekerja pitstop terdapat monitoring dan evaluasi secara berkala dan menggunakan media *whatsapp*. Dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat, pihak kelurahan dan kecamatan mengadakan sosialisasi terkait program Rumah Padat Karya Pitstop dengan tujuan mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam program tersebut.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Program Rumah Padat Karya Pitstop menunjukkan bahwa struktur pelaksana dan pembagian peran antar instansi telah terbentuk sesuai ketentuan Peraturan Walikota No 83 Tahun 2022 tentang Rumah Padat Karya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola dan pekerja Pitstop, ditemui bahwa pelaksanaan pendampingan dan pemantuan belum terlaksana dengan baik, khususnya dari pihak kelurahan sebagai pelaksana di tingkat lokal. Apabila fungsi pengendalian dan pendampingan program belum terlaksana secara optimal, maka permasalahan yang muncul di lapangan berpotensi tidak segera teridentifikasi dan tertangani.

Dampaknya berbagai kendala yang seharusnya dapat diselesaikan secara dini justru berlarut-larut dan berujung pada terhambatnya keberlangsungan kegiatan usaha, bahkan dapat menyebabkan berhentinya operasional program. Dalam konteks ini, fungsi pembinaan dan pemantauan menjadi krusial sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan program serta memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Sejalan dengan pendapat William N. Dunn dalam (Puspita, 2021) yang menyatakan bahwa fungsi monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan terjadi serta mengapa terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan adanya monitoring yang baik, pelaksana kebijakan dapat mengidentifikasi hambatan secara lebih cepat serta melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan.

5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Secara lingkungan ekonomi di Kelurahan Lidah Kulon menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif baik, yang berdampak pada tingkat partisipasi dalam Program Rumah Padat Karya Pitstop. Meskipun program ini ditujukan bagi keluarga GAKIN, tidak seluruh kelompok sasaran bersedia terlibat karena adanya preferensi terhadap pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, Pitstop juga menghadapi tantangan berupa tingginya persaingan dengan usaha sejenis serta

keterbatasan lokasi yang kurang strategis, sehingga memengaruhi daya tarik konsumen dan keberlangsungan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi eksternal, seperti tingkat kesejahteraan dan dinamika pasar, menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi dan daya saing program. Kondisi sosial masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi Program Rumah Padat Karya Pitstop, khususnya dalam aspek kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Pada tahap awal, terdapat polemik terkait penggunaan lahan akibat kurangnya sosialisasi yang menimbulkan perbedaan persepsi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya modal sosial, terutama dalam aspek kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Upaya sosialisasi ulang dan komunikasi yang lebih intensif, tingkat penerimaan masyarakat mulai meningkat ketika kondisi sosial yang didukung oleh komunikasi yang baik dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi program. Kondisi politik dalam implementasi Program Rumah Padat Karya Pitstop menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah sebagai elit pengambil kebijakan. Hal ini tercermin dari adanya landasan hukum berupa Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 serta keterlibatan aktif berbagai perangkat daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi melalui rapat yang difasilitasi oleh BAPEDALITBANG juga menunjukkan adanya komitmen politik dalam mendukung keberlangsungan program

6) Disposisi Implementor

Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan ini memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, karena menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari. Dalam variabel disposisi pelaksana menggambarkan sikap implementor terhadap kebijakan, meliputi penerimaan, komitmen, serta pemahaman dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Van Meter Van Horn (1975) menjelaskan bahwa disposisi implementor memiliki tiga elemen dari respon implementor dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan yakni, pemahaman pelaksana, respon pelaksana terhadap program yang dijalankan dan insensitas respon pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari pihak implementor akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik (Bintang & Aedah, 2022).

Implementasi Program Rumah Padat Pitstop menunjukkan bahwa sikap penerimaan dan komitmen yang cukup kuat terhadap tujuan program. Hal tersebut dapat dilihat dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas serta komitmen pengelola dalam menyusun strategi mempertahankan usaha. Adanya dukungan pemerintah sejak tahap

pembangunan hingga penyediaan sarana prasarana mencerminkan komitmen untuk mendorong keberhasilan program. Selain itu, disposisi implementor juga tercermin dari inisiatif pengelola dalam menyusun strategi keberlanjutan usaha, seperti menjalin kerja sama dengan pelaku usaha sejenis di sekitar lokasi serta memberikan layanan khusus bagi perangkat desa.

Upaya tersebut menunjukkan adanya kesungguhan pelaksana dalam mengembangkan usaha dan memperluas jejaring dukungan agar program tetap berjalan. Kemudian, bantuan pembiayaan operasional dari pihak kecamatan memperlihatkan bentuk dukungan nyata yang memperkuat motivasi pelaksana dalam mempertahankan aktivitas program. Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Fernanda, Radjikan, & Basyar, 2025) sikap para pelaksana terhadap program ini menunjukkan dukungan yang kuat dan penuh optimisme. Mereka memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam upaya menyukseskan program, terutama karena program ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut. Para pelaksana, seperti camat, lurah, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, bersikap responsif dan aktif dalam mendukung pelaksanaan program.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Implementasi Program Rumah Padat Karya (RPK) Pitstop di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa standar dan sasaran program telah dirumuskan secara jelas, tetapi dalam praktiknya terjadi penyesuaian sasaran penerima manfaat akibat rendahnya partisipasi kelompok keluarga miskin. Selain itu, tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara maksimal karena pendapatan penerima manfaat masih tergolong rendah.

Pada aspek sumber daya, program telah didukung oleh pembiayaan, fasilitas, serta pelatihan keterampilan yang cukup memadai melalui sinergi antara pemerintah dan pihak swasta. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga mekanik profesional yang berdampak pada kualitas pelayanan dan pengembangan usaha. Dari sisi komunikasi antar organisasi, koordinasi antar *stakeholder* telah berjalan melalui berbagai media formal maupun informal, meskipun proses monitoring dan evaluasi belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pelaksana di tingkat lokal.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan adanya pembagian tugas dan struktur kelembagaan yang jelas, tetapi fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan belum berjalan optimal, terutama pada tingkat kelurahan. Sementara itu, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi implementasi program, seperti rendahnya minat masyarakat, persaingan usaha, lokasi usaha yang kurang strategis, serta minimnya kepercayaan masyarakat pada tahap awal pelaksanaan program. Dukungan politik dari pemerintah daerah menjadi faktor pendukung penting dalam keberlangsungan program.

Pada aspek disposisi implementor, pelaksana program menunjukkan sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan kebijakan. Pengelola program juga memiliki inisiatif untuk mempertahankan keberlanjutan usaha melalui kerja sama dengan pelaku usaha sekitar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar pelaksana, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Program Rumah Padat Karya Pitstop di masa mendatang.

SARAN

Keberhasilan dan keberlanjutan Program Rumah Padat Karya Pitstop, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan mekanik profesional, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan bengkel maupun lembaga pelatihan kerja. Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan melalui pelayanan yang lebih berkualitas, transparan, dan responsif, seperti pemberian garansi layanan, konsultasi gratis, serta penyediaan media pengaduan dan evaluasi.

Koordinasi antar pihak pelaksana juga perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi dan pembagian tugas yang jelas agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Pendampingan intensif melalui monitoring, evaluasi, pembinaan, dan arahan teknis secara berkala penting dilakukan guna membantu pelaksana menghadapi berbagai kendala di lapangan. Di samping itu, kerja sama dengan pihak swasta perlu dikembangkan secara berkelanjutan dalam bentuk kemitraan jangka panjang untuk mendukung peningkatan keterampilan, pengalaman kerja, pengembangan jaringan usaha, serta keberlanjutan program Rumah Padat Karya.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Annazah, N. S., Amrizal, M. D., Setiawan, Y., Yamanto, A., & Muhyiddin. (2024). Kajian Kebijakan Pelaksanaan Program Padat Karya. *Policy Paper, Vol. 2 No. 1*, 2-33.

- Baharuddin, i. A., Isa, M. H., & Mustafa, S. (2025). FACTOR INFLUENCING OPERATIONAL EFFICIENCY AND ITS IMPACT ON CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF AMY ROSLI GARAGE. *ADVANCED INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND SMES*, 129-135. doi:DOI 10.35631/AIJBES.726010
- Bintang, Z., & Aedah, N. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA. *Jurnal Kebijakan Publik* , 85-91.
- Dewi, D. S. (2022). *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru .
- Diani, B. A. (2023). *Analisis Pengaruh Kompetensi, Ketelitian, dan Kecepatan Pelayanan Mekanik Terhadap Kepuasan Pelanggan* . Universitas Semarang .
- Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukamana, M. G., & Tefa, G. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fernanda, D., Radjikan, & Basyar, M. R. (2025). Implementasi Program Padat Karya Produksi Paving dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur) . *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*.
- Ghafur, A. H. (2022). *Kebijakan Publik: Memperkuat Basis Kebudayaan dalam Kebijakan*. Malang : Intrans Publishing.
- Izzah, Z., & Hertati, D. (2024). Implementasi Program Padat Karya dalam Pengurangan Pengangguran di Kota Surabaya : Sebuah Analisis Berdasarkan Model Davis C.Korten. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6. No. 1*. doi:<https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.316>
- Kendi, I. K. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik : Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, 324 - 334.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta.
- Meter, D. S., & Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. California: Sage Publications.
- Puspita, M. (2021). *Monitoring dan Evaluasi Program* . Universitas Esa Unggul .
- Rahmawati, S., Margaretha, M., Andera, P., Arbain, F. N., & Reviandani, O. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN PABEAN CANTIAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3047-3055.
- Sabaruddin, A., Elwan, L. O., Maulid, & Mardiana. (2024). *Kolaborasi Quadruple Helix: Pendekatan Teori dan Praktik*. Bandung: Bildung.
- Siswanto, D. W., & Prastyawan, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Rumah Padat Karya di Kelurahan Bringin, Kota Surabaya). *Inovant* .
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* . Indramayu : Adanu Abimata .

Supriatna, A., Sunarsi, D., & Permatasari, R. I. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang.